

KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PENYELAMATAN PATUNG PANGULUBALANG TERHADAP POTENSI KONFLIK VERTIKAL DI KABUPATEN SIMALUNGUN

AN EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE SALVATION OF PANGULUBALANG STATUE AS AN ANTICIPATION TO VERTICAL CONFLICT POTENTIALS IN THE REGENCY OF SIMALUNGUN

Defri Elias Simatupang

Balai Arkeologi Medan

Jl. Seroja Raya Gg Arkeologi No. 1 Medan
difrai_simatupang@yahoo.co.id

Naskah diterima:
12 Agustus 2013

Naskah disetujui terbit:
16 Oktober 2013

Abstrak

Tulisan ini berawal dari peninjauan Balai Arkeologi Medan terhadap temuan berupa patung pangulubalang di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Peninjauan saat itu memiliki situasi kegentingan (urgensi) karena peninjau harus berusaha menyelamatkan patung tersebut dari niat pemusnahan oleh masyarakat ahli waris. Demi menjaga keselamatan peninjau dari potensi konflik vertikal yang dapat saja terjadi, tim pulang untuk melaporkan kepada pimpinan kantor untuk memikirkan langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil. Berdasarkan kejadian tersebut, tulisan ini mencoba meninjau sejauh mana (urgensi) pentingnya komunikasi yang efektif dilakukan saat aparat pemerintah melakukan penyelamatan benda yang diduga cagar budaya dengan semaksimal mungkin menghindari potensi konflik vertikal. Tulisan ini menggunakan penalaran induktif yang berawal dari pembahasan setiap data yang selanjutnya menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang dapat dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasi untuk ditarik menjadi tawaran solusi model kebijakan penyelamatan benda yang diduga cagar budaya seperti patung pangulubalang yang ada di Kabupaten Simalungun.

Kata kunci : urgensi, komunikasi efektif, patung pangulubalang, konflik vertikal

Abstract

This article initiated from a review made by the Archaeological Office on the discovery of Pangulubalang statue in Simalungun Regency, North Sumatra Province. It was such an urgent review due to the salvation of the statue from the destructive intent by the inheriting society. In the face of imminent vertical conflict, the research team head for home to consult the head of the archaeological office for strategic measures. The incident drove a conduct of a review on the urgency of an effective communication when the government apparatus attempts to save the suspected cultural heritage object while avoiding potential vertical conflict. Inductive reasoning used in this article commenced from the discussions of every data from which a general conclusion will be drawn. The collected data will be analyzed and interpreted as an offered solution model for a salvation policy of the cultural heritage suspected object such as the Pangulubalang statue in Simalungun Regency.

Keywords : urgency, effective communication, pangulubalang statue, vertical conflict

1. Pendahuluan

Berawal dari kegiatan peninjauan Balai Arkeologi Medan di areal makam Tuan Rondahaim, Desa Aman Raya, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Peninjauan dilatarbelakangi atas berita di surat kabar (Harian SIMANTAB, Jumat 28 Juli 2013),

seputar temuan dua patung yang kabarnya adalah patung panglubalang. Patung tersebut ditemukan secara tidak sengaja, disaat melakukan penggalian mempergunakan cangkul di areal makam. Temuan dilaporkan kepada BSS*, seorang aktivis Komunitas Jejak Simalungun (KJS). Balai Arkeologi Medan pada tanggal 5--7 Juli 2013 melalui salah seorang staf penelitiannya melakukan peninjauan ke lokasi bersama BSS dan seorang temannya. Peninjauan yang dilakukan, hanya menemukan satu patung saja yang terbuat dari batu setinggi empat puluh sentimeter. Satu patung lagi kabarnya telah diambil oleh seorang warga ahli waris bernama Rabana Garingging. Selanjutnya dilakukan pengecekan dengan datang ke rumahnya. Ketika ditanyakan perihal keberadaan patung tersebut, dengan ketus BRG* menjawab “patung itu sudah kupecahkan, kenapa rupanya? Apa urusan kalian dengan patung buatan leluhur kami?”. Jawaban tersebut terkesan menantang, meskipun sudah dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi Balai Arkeologi Medan. Jawaban tersebut tentu tidak langsung dipercaya dan salah seorang peninjau secara diam-diam mencoba mencari menelusuri keberadaan patung di luar di sekitar pekarangan rumah tersebut. Alhasil ditemukan sebuah patung yang tertanam secara sembarangan bersama tumpukan bubuk kayu (lihat gambar 1). Untuk mencegah situasi yang menjurus konflik memanas, tim bergegas pamit pulang untuk memikirkan langkah selanjutnya.



Gambar 1. (1) Makam Raja Raya TRS Garingging ; (2) Lokasi temuan patung Panglubalang, yang awalnya berjumlah dua, (3) Dibelakang rumah Rabana Garingging, yang mengaku ahli waris dan mengaku kepada tim telah memusnahkan satu patung panglubalang (Dok. Balai Arkeologi Medan, 2013)

Selepas dilakukan pelaporan kepada Kepala Balai Arkeologi Medan, timbul pemikiran agar kejadian ini sebaiknya dilaporkan kepada pihak penegak hukum terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang perusakan terhadap benda yang diduga benda cagar budaya (BCB). Dimana mengacu terhadap Pasal 104, yang berbunyi : “ Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Mengingat tupoksi Balai Arkeologi Medan yang terfokus di kegiatan penelitian saja, langkah yang ditempuh hanya melakukan koordinasi persuratan kepada instansi terkait lain yang lebih kompeten mengurus masalah pidana terkait cagar budaya, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banda Aceh dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Simalungun. Koordinasi antar unsur-unsur terkait (stageholder) sesuai tupoksi masing-masing, merupakan langkah awal agar tidak terjadi overlapping kewenangan. Namun masalah yang muncul terkait persepsi masyarakat umum (publik) terhadap keberadaan instansi yang berwenang terkait penanganan temuan dianggap penting untuk dituangkan dalam sebuah kajian tulisan ilmiah.

Pemahaman masyarakat yang di sekitar daerah penemuan benda cagar budaya (termasuk benda yang masih bersifat dugaan), berpotensi menimbulkan konflik vertikal dengan instansi pemerintah. Sebagian bisa saja menolak kehadiran aparaturnya yang bertugas, meskipun hanya sebatas tahapan peninjauan. Upaya pelestarian cagar budaya selanjutnya masih mengacu terhadap UU CB No. 11 Tahun 2010, dimana pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang paling lama tiga puluh hari sejak ditemukan. Selanjutnya pada ayat (3) dikatakan bahwa yang berhak melakukan pengkajian adalah instansi yang berwenang di bidang kebudayaan. Maka tulisan ini menghubungkan antara arkeologi sebagai sebuah kajian rekonstruksi kebudayaan masa lampau melalui benda-benda yang ditinggalkannya (Haryono 1984, 5), dengan seberapa urgen respon aksi-reaksi masyarakat akan benda-benda tersebut. Istilah urgensi dapat dipahami sebagai keperluan yang amat penting dan mendesak, yang memerlukan keputusan dan tindakan yang segera (Pius 2001, 770). Kajian ini perlu selalu dievaluasi untuk didiskusikan secara terbuka demi mempertajam metodologi arkeologi sebagai disiplin ilmu yang lebih sesuai kebutuhan dan tantangan masyarakat terkini (Okamura dan Matsuda 2011, 14). Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah : “Bagaimana urgensi komunikasi efektif dapat ditempuh dalam menyelamatkan patung pangulubalang untuk menghindari konflik vertikal di Kabupaten Simalungun?”.

Tujuan karya tulis ini mencakup dua aspek manfaat yaitu teoritis dan praktis. Aspek teoritis mencakup sasaran meliputi pengukuran tingkat urgensi berkomunikasi secara efektif antara berbagai lapisan masyarakat (publik) dengan pemerintah dalam hal ini aparaturnya.

Interaksi bukan hanya disampaikan oleh kalangan arkeologi kepada publik, tetapi publik juga diharapkan memberikan respon dan masukan kepada kalangan arkeologi dalam bentuk interpretasi (Sulistyanto 2008, 64). Kajian terhadap interpretasi dua arah ini penting untuk membangun komunikasi secara strategis antara arkeolog sebagai penyampai pesan hasil kajian budaya materi (komunikator) dengan publik sebagai penerima pesannya (komunikan). Adapun manfaat praktis tulisan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dan publik dalam menyelesaikan konflik kepentingan sumber daya arkeologi dalam hal ini meminimalisir respon negatif publik terhadap upaya pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penulisan tinjauan ini, metode yang digunakan bertipe deskriptif - induktif. Penulis memaparkan data informasi yang akurat sambil menginterpretasikannya secara kritis dengan membahasnya dengan teori-teori yang relevan (Moleong 2004, 149--151) sebelum mengambil sebuah kesimpulan (hipotesa) terkait urgensi komunikasi efektif dapat ditempuh dalam menyelematkan patung pangulubalang agar menghindari konflik vertikal di Kabupaten Simalungun. Artefak megalitik seperti patung pangulubalang yang berasal dari waktu lampau setelah ditemukan idealnya sambil dibaca oleh arkeolog, juga tidak kalah penting mengaitkan objek dengan perilaku manusia masa kini dengan menempatkannya pada konteks sistem kekinian (Sonjaya 2008, 125--126).

Miskomunikasi adalah aspek ontologis kajian Ilmu Komunikasi karena berkaitan dengan masalah manusia dalam melakukan interaksi sosial. Miskomunikasi dapat terjadi kapan saja ketika seseorang memberi reaksi terhadap pesan seperti itu. Kemungkinan besar ada gangguan, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif, sebagaimana harapan pemberi pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) (Cangara 2007, 153). Kajian Ilmu Komunikasi berpangkal pada ide atau lambang yang akan membawa persoalannya pada aspek fungsinya dan selanjutnya memperhitungkan efeknya dalam kehidupan bermasyarakat (Zamroni 2009, 86). Di samping itu juga, ada komponen lain yang terkait dengan keduanya, yakni isi pesan dan saluran/media yang digunakan. Dengan perpaduan yang sempurna dari keempat elemen komunikasi, seseorang tidak akan sulit mentransfer pesan apa saja ke orang lain. Sebagai contoh ketika seseorang berbicara kepada orang lain tentang suatu topik yang penting dan mendesak, maka dia harus mampu menyampaikan pesan tersebut sebaik dan seefektif mungkin. Sebaik mungkin agar pesan tidak ditangkap salah, dan dipahami dalam waktu yang singkat. Maka urgensi komunikasi yang efektif merupakan sebuah keniscayaan demi pencapaian berbagai hal positif. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif akan berdampak buruk berupa konflik baik bagi komunikator maupun komunikan. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena cara untuk mencapainya berbeda, meskipun tujuannya sama (Wirawan 2010, 8).

2. Pembahasan

2.1. Eksistensi Patung Pangulubalang sebelum abad XX

Patung Pangulubalang atau biasa juga disebut ulubalang merupakan patung hiasan tinggalan kebudayaan Batak yang dimasa kepercayaan sipelebegu (animisme) sebelum abad ke-20. Patung ini biasanya diletakkan di setiap perbatasan huta (kampung marga) yang berfungsi sebagai penjaga kampung ketika masyarakat sedang berpergian. Patung yang biasanya terbuat dari kayu atau batu ini, dikenal akan kekuatan magis berupa adanya kekuatan roh didalamnya untuk melindungi kampung dari serangan non-fisik dari pihak musuh. Patung pangulubalang adalah patung yang diisi pupuk (abu mayat manusia yang dikorbankan). Untuk membuat patung pangulubalang, seorang anak kecil dari luar kampung diculik, lalu dipelihara sementara bersama dukun kampung. Segala maunya dituruti agar merasa senang, betah, dan mau patuh. Pada saat yang ditentukan, kemudian si anak secara ikhlas mau dikorbankan untuk dijadikan pangulubalang (Marbun 1987, 124). Korban dibunuh dengan memasukkan ke dalam mulutnya berupa cairan timah yang mendidih. Kemudian mayatnya dipotong-potong dan dicampur dengan beberapa ramuan dan dibiarkan membusuk. Air fermentasi yang keluar dari mayat anak tadi disimpan di dalam cawan, lalu sisanya dibakar untuk mendapatkan abunya. Untuk memanggil si anak yang sudah dikorbankan tadi, disiapkanlah patung. Patung inilah yg disebut Pangulubalang. Roh yang ada di dalam Patung Pangulubalang, selain menjaga kampung juga bisa memberitahukan jika ada masalah yang mengganggu kampung (Wiradnyana 2011, 177). Maka sebelum mengganggu kampung, dapat ditugaskan pergi ke daerah musuh untuk menutup mata dan telinga mereka sehingga tidak mampu berperang. Masing-masing patung memiliki kekuatan sihir yang kuat sering terpahat untuk membela diri ataupun menyerang.

Penculikan anak kecil antar kampung untuk ditumbalkan demi membuat sebuah patung pangulubalang, terindikasi sering menjadi biang perselisihan antarmarga atau perang antar-kampung. Konflik ini tentunya dianggap wajar terjadi, apalagi ini menjadi bagian dari legitimasi akan prestasi masing-masing pemimpin ketika mampu membuat banyak Patung Pangulubalang di kampungnya. Patung Pangulubalang pada masyarakat Batak adalah salah satu bentuk jawaban dan penyesuaian kebudayaan terhadap tantangan-tantangan alam yang dihadapinya. Kesadaran akan di balik pembuatan patung-patung tersebut merupakan manifestasi berbagai kepentingan religi, sosial, politik maupun ekonomi sang pemimpin kampung. Pangulubalang menjadi semacam alat yang ampuh untuk mencapai berbagai kepentingan tertentu. Namun pesan akan keangkeran patung pangulubalang menurut sejarah ternyata tidak menyelesaikan masalah konflik antarkampung. Kepentingan jahat orang luar akan niat masuk ke dalam sebuah kampung berpotensi selalu ada bila melihat pangulubalang yang tidak menunjukkan kemagisannya. Patung pangulubalang yang tidak terawat dapat diartikan sebagai pesan bahwa wilayah yang hendak dimasuki telah dikalah dari serangan patung pangulubalang dari kampung lain. Atau bisa juga dengan mengalahkan hulubalang,

yang merupakan manusia yang mempunyai kendali atas patung pangulubalang dan membendung serangan fisik lawan.

Dalam keseluruhan sistem religi masyarakat Batak, patung pangulubalang adalah salah satu artefak yang didalamnya terjalin sifat-sifat magi dan religi. Selaku magi, ia berfungsi sebagai magis pelindung, magis produktif dan magis perusak. Dalam budaya masyarakat Batak Toba, patung pangulubalang mempunyai persamaan fungsi dengan ulubalang, sebagai penahanan serangan musuh. Bedanya hulubalang untuk pertahanan serangan secara fisik, sedangkan pangulubalang untuk pertahanan perisai secara nonfisik/magis. Eksistensi patung pangulubalang pada masanya sangat terjaga rahasia eksistensinya sebenarnya terdapat pada isi cerita yang terkandung pada patung yang telah merasuki syaraf-syaraf kesadaran dan pengertian akan kebenaran otoriter dari generasi ke generasi dalam kepercayaan masyarakat sebelum abad XX. Patung Pangulubalang yang diletakkan di setiap perbatasan kampung merupakan sebuah pesan akan adanya alat pengawas bagi masyarakat sekampung. Patung Pangulubalang dianggap sebagai video kamera yang ditempatkan pada setiap sisi swalayan, yang mampu menangkap gambar virtual dengan sudut yang begitu luas. Pengunjung swalayan merasa dipantau oleh video-video tersebut, sehingga pengunjung akan membatalkan niat-niat buruk seperti mencuri.

Efektifitas cermin sebenarnya terletak pada prasangka dalam hati pengunjung itu sendiri yang merasa terus diamati dari setiap sudut. Patung pangulubalang melebihi kekuatan fungsi cermin cembung, patung tidak perlu hadir dalam setiap aktivitas warga. Eksistensi patung pangulubalang dikemas dalam mitos dan magis, bukan saja mampu menghindari pencurian, melainkan sebagai kontrol moral dan kontrol lingkungan. Sosok patung yang bentuknya hanya berupa seonggog batu atau kayu, pada masanya telah mampu diterjemahkan sebagai sosok patung menjadi melebihi bentuk realis, dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Perilaku manusia Batak lama (sebelum masuknya Islam dan Kristen). Objek dunia lahiriah maupun tindakan manusia, dalam arti yang tepat, sama sekali tidak memiliki nilai intrinsik yang otonom. Objek maupun tindakan mendapatkan nilai yang menjadi nyata, karena mereka berpartisipasi, menurut salah satu cara atau cara yang lain, dalam realitas yang mengatasi mereka. Banyak yang tidak tahu siapa pembuat batu, karena seniman pembuat patung membuatnya secara baik dan rahasia sebelum meletakkannya sebagai monumen di batas kampung (Marsden 2013, 448). Ada indikasi bahwa ketika berbagai batu yang tidak terhitung jumlahnya dipilih untuk dijadikan monumen suci yang fitur-fiturnya sangat terlihat kebatakannya, namun bersifat individual agar karakter tiap patung tidak saling mencontoh antar seniman pembuatnya. Sehingga identitasnya dirahasiakan hanya beberapa orang saja yang tahu di dalam kampung.

2.2. Turunnya Eksistensi Patung Pangulubalang setelah abad XX

Setelah abad XX, dengan mulai eksisnya agama baru seperti Islam dan Kristen, patung-pangulubalang tidak lagi menjadi simbol yang memiliki daya kekuatan yang melekat. Selama tahun-tahun terakhir banyak batu monumen Batak telah hancur karena kurangnya perlindungan. Mereka dianggap sebagai rintangan untuk Islamisasi maupun Kristenisasi terhadap desa yang masih menghormati nenek moyang mereka dan menjalankan kebiasaan tradisional. Meluasnya dampak negatif dari pembuatan patung pangulubalang pada akhirnya menjadi dilema bagi masyarakat Batak. Di masa kini terlepas dari percaya atau tidak akan kekuatan magis patung pangulubalang, akan semakin sulit mengamankannya karena kuatnya motivasi masyarakat dan meningkatnya tingkat ketidakpercayaan kepada aparaturnegara. Mereka umumnya memakai alasan bahwa perbuatan mereka sesuai dengan perintah agama mereka. Menghancurkan segala benda-benda yang mewakili simbol-simbol agama masa lalu. Sangat sulit membedakan respon penerimaan dengan penolakan bagi mereka yang sekedar mencoba bertanya tentang keberadaan patung tersebut. Dilema yang muncul ketika ada penerimaan dan penolakan pangulubalang sebagai warisan leluhur yang tidak sesuai dengan ajaran agama masa kini. Maka tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk memilah-milah selain campur tangan pemerintah dalam menyelamatkannya. Dibutuhkan komunikasi yang baik dan efektif dalam menjaring data tersebut dari tangan masyarakat, khususnya mereka yang berseberangan terkait penolakannya sebagai benda cagar budaya.

Patung pangulubalang tidak lagi ampuh untuk menjaga kampung, karena cerita yang terkandung pada patung tidak lagi merasuki syaraf-syaraf kesadaran dan pengertian akan kebenaran otoriter dari generasi terkini. Sebenarnya masih banyak yang takut dengan keberadaan patung pangulubalang di kampung masing-masing, karena akan menjadi cermin cembung yang membuat masyarakat swalayan merasa dipantau oleh cermin-cermin yang berada pada setiap sudut, oleh sebab itu akan membatalkan niat-niat buruk yang direncanakannya. Motivasi menghancurkan patung-patung pangulubalang bisa saja untuk semakin menghilangkan perasaan takut masyarakat agar tidak merasa diawasi bila melakukan perbuatan tercela seperti mencuri hasil ladang orang lain atau melakukan perzinahan terlarang di tempat-tempat yang sepi seperti di ujung kampung. Eksistensi patung dikemas dalam mitos dan magis, sebagai kontrol moral dan kontrol lingkungan agar senantiasa terjaga perlahan ditinggalkan dengan alasan perintah ajaran agama baru. Nilai-nilai filsafat patung primitif Batak yang awalnya merupakan kearifan lokal tidak lagi diimplementasikan dalam setiap kehidupan masyarakat Batak terkini. Patung primitif Batak salah satu penanda agar manusia yang hidup pada masa sesudahnya menemukan kearifan dari peristiwa yang pernah terjadi. Dalam nyawa benda "tak hidup" itu tidak mampu lagi memahami rahasia alam melalui patung primitif itu.

Bentuk patung pangulubalang akhirnya hanya sebagai sebongkah artefak primitif. Bumbu mitos tidak lagi membuat penyerapan maknanya sebagai bentuk objektif maupun imajinatif. Kekuatan energi dalam patung tidak lagi dipahami seperti yang berakar dalam religi

masyarakat Batak lama. Manifestasi religi masyarakat Batak dalam ritus atau bentuk lain memang berubah sesuai dengan perjalanan waktu, perubahan politik, ekonomi, teknologi, pengaruh timur (Islam) dan Barat (Kristen dan Kolonisasi) dan nasionalisme. Transformasi yang kini memiliki nilai subjektif yang otonom tentang patung itu. Konsep dan pengertian tidak berlaku universal serta mutlak, manusia Batak berkuasa akan pengertiannya masing-masing. Pengertian baru telah terpatriti untuk disampaikan secara turun-temurun dalam masyarakat kedepannya. Patung Pangulubalang tidak lagi menjadi alat presentasi kekuatan alam yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol misterius dan mistis. Transformasi dalam hal ini bisa juga lebih baik memilih 'loyalitas ganda', yaitu kepatuhan baik kepada religi Batak Toba maupun kekristenan mereka (Nainggolan 2012, 229-233). Dengan demikian patung hanya menjadi teks atau bahasa mereka mengungkapkan pikiran-pikiran seni nenek moyang mereka. Dengan seni sebagai simbol perasaan, manusia dari masa ke masa menemukan kebebasannya dan mentransmisikan pengetahuannya secara baik dalam rangka memahami pengalaman fisik yang sebenarnya merupakan refleksi dari hal yang bersifat nonfisik. Namun kebebasan ekspresi tersebut kalau tanpa di barengi dengan penghargaan hasil karya orang-orang sebelumnya dapat menimbulkan pelanggaran hukum formal seperti 'perlawanan' yang dilakukan bapak Rabana Garingging.

2.3. Potensi Konflik Vertikal sebagai Hambatan Penyelamatan Patung Pangulubalang

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu konflik vertikal dan horizontal (Wirawan 2010, 116). Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Konflik horizontal merupakan konflik terjadi di kalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat. Respon yang diberikan BRG kepada tim peninjau merupakan sebuah contoh adanya potensi konflik vertikal. Negara-negara yang majemuk seperti Indonesia memang akan dihadapkan pada kecenderungan potensi konflik vertikal akibat akses kontrol, dan distribusi kelompok manusia yang dipisahkan secara tajam, serta sektor politik yang tidak partisipatif bagi pemerataan semua kelompok menjadikan generalisasi kaku dan menyakitkan terhadap sekelompok orang (prasangka). Prasangka ini muncul akibat keyakinan yang tidak pas, keliru atau bahkan negatif. Cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara (Damarastuti 2013,76). Dalam situasi kesenjangan antara masyarakat setempat dan aparat pemerintah (berbeda suku dan asal), respon masyarakat setempat akan cenderung memanfaatkan loyalitas tradisionalnya, yaitu melalui ikatan primordialnya. Demikian pula, kelompok yang diuntungkan oleh situasi yang timpang berupaya mengerahkan loyalitas tradisionalnya untuk kepentingan pribadi mereka. Melihat potensi konflik vertikal yang ada,

kehati-hatian bagi aparaturnegara sangat diperlukan dalam mengeluarkan pesan verbal maupun nonverbal kepada mereka.

Pesan verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dalam bentuk kata-kata melalui tulisan atau lisan. Seperti contoh tim peninjau berbicara langsung dengan BRG terkait maksud kedatangan mereka di rumahnya. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan non verbal memiliki sifat kurang terstruktur, tidak universal sehingga sulit mempelajarinya secara generalisasi. Perbedaan daerah, pendidikan, ruang lingkup sosial akan mempunyai latar belakang yang berbeda, bisa menyebabkan penafsiran atas sesuatu yang tidak sama pula sehingga dianggap penting pemahaman akan komunikasi nonverbal tetaplah merupakan suatu kondisi yang harus dipelajari (Mulyana 2001, 343). Pentingnya komunikasi nonverbal antara lain penyampaian pesan yang didasarkan akan perasaan dan emosi akan sangat kelihatan alami. Selanjutnya dengan memperhatikan isyarat nonverbal seseorang dapat mendeteksi atau menegaskan kejujuran pembicara. Sehingga komunikasi inilah yang layak disebut bersifat efisien. Menurut Reusch ada tiga bagian dalam mengklasifikasikan pesan nonverbal. Pertama, bahasa tanda (sign language) seperti acungan jempol untuk menumpang mobil secara gratis di negara Amerika. Kedua, bahasa tindakan (action language) seperti semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan pesan berjalan. Ketiga, bahasa objek (object language) yaitu pertunjukan benda yang memberikan pesan kepada publik (Mulyana 2001, 352).

Dalam pelaksanaan berkomunikasi baik verbal dan nonverbal seringkali tidak semua pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Faktor yang harus diketahui adalah masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya ketidakpercayaan terhadap isi pesan. Keraguan akan isi pesan karena kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima. Sederhanya diperlukan waktu yang lebih lama lagi sebagai proses adaptasi. Namun berbicara penyelamatan tidak memiliki kompromi waktu. Saat itu juga pesan pidana akan patung pangulubalang yang hendak dimusnahkan idealnya sampai ke BRG, agar tidak dimusnahkannya (meskipun dia berbohong mengatakan kepada tim peninjau bahwa telah dimusnahkannya). Keraguan yang muncul untuk menyampaikan pesan dipengaruhi faktor potensi konflik vertikal. Perhitungan lebih lanjut harus dipikirkan tim peninjau ketika secara diam-diam patung pangulubalang sudah diketemukan di pekarangan rumahnya. Bukan tidak mungkin BRG akan semakin marah, bahkan tidak hanya cuma mengusir tim peninjau. Keraguan akan isi pesan pun semakin bertambah. Pada akhirnya pesan untuk berpamitan pulang dapat dimaklumi sebagai skala prioritas subjektif individualis oleh tim peninjau.

Pertentangan emosi dan kesulitan dalam mengekspresikan pesan verbal dan non-verbal menjadi hambatan tim peninjau. BRG selaku komunikan maupun komunikator terdeteksi

sejak awal telah memiliki pesan perlawanan berdasarkan apa yang disampaikannya kepada tim peninjau. Penyebab terjadinya miskomunikasi ini pun lebih disebabkan faktor tim peninjau. Berpamitan pulang tanpa berhasil menyelamatkan patung pangulubalang tersebut dapat dinilai sebagian orang sebagai kegagalan tim peninjau menguasai suasana komunikasi yang urgen pada saat itu. Namun bisa juga orang lain menilai bahwa faktor perhitungan potensi konflik vertikal yang beresiko mengancam keselamatan nyawa tim peninjau patut dinilai sebagai kesuksesan membaca suasana komunikasi yang urgen. Masalah dalam menafsirkan pesan dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang bahasa, karena bahasa menjadi inti dari komunikasi sekaligus sebagai realitas bagi manusia tersebut (Kuswarno 2008, 8). Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahasa tubuh, lama bicara, konsisten berbicara sesuai topik, dan kesabaran mendengarkan. Dengan memperbanyak latihan untuk mempraktekkannya berulang akan lebih menambah skill berkomunikasi secara efektif (Riddle, 2011).

2.3. Model Komunikasi Efektif Menghindari Konflik Vertikal

Ukuran sebuah komunikasi telah efektif bukan semata-mata bagaimana menyampaikan pesan secara positif (ada nilai kebenaran yang logis), namun jauh lebih penting lagi adalah bagaimana respon komunikan, apakah positif atau justru negatif. Banyak orang sepele bahwa proses komunikasi adalah sesuatu yang mudah dan sederhana. Pada kenyataannya, untuk mampu berkomunikasi secara efektif, diperlukan latihan dan keahlian khusus serta memiliki banyak aspek yang perlu dipelajari. Melatih kemampuan untuk mendapatkan respon, sesuai dengan pesan yang disampaikan adalah kunci dari komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif tidak hanya dengan ucapan semata, tapi juga didukung dengan penampilan yang menarik. Albert Mehrabian mengatakan bahwa unsur verbal dari komunikasi yang efektif hanyalah 7%, selebihnya terdiri dari unsur non verbal yaitu vocal sebesar 38% dan visual sebesar 55% (Sirait 2007, 100). Misalkan penampilan (pakaian kedinasan) para tim seharusnya memberikan informasi yang lain terkait penekanan dalam mengambil dari tangan mereka. Alur percakapan ditonjolkan dengan ekspresi emosi yang tepat selaku petugas penegak hukum. Ini menguatkan pesan-pesan verbal sebelumnya untuk mempengaruhi. Intonasi suara yang keras, menggunakan bahasa daerah yang fasih, bisa saja membuat respon BRG berbeda, atau dengan berpakaian polisi dengan maksud sekedar 'menakuti-nakuti' saja.

Komunikasi efektif yang pragmatis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menyelamatkan dan melestarikan benda cagar budaya seperti halnya hubungan antar manusia pada hubungan manusia dengan alam. Hal itu merupakan medium simbolis untuk membangun kesepahaman masyarakat terhadap permasalahan pembangunan. Pada dasarnya perkara yang paling banyak kita rencanakan adalah pembangunan yang mengakibatkan perubahan sosial masyarakat yang disamakan dengan proses modernisasi (Rochajat 2011, 280-281). Dalam lingkup praktis, model komunikasi yang efektif menyangkut strategi pengemasan pesan dan media untuk mendorong pengetahuan, kesadaran dan

partisipasi masyarakat. Di sini, pemerintah maupun organisasi nonpemerintah yang serius terhadap masalah penyelamatan cagar budaya merupakan komunikator kunci dalam pembuatan kebijakan/program yang efektif untuk membangun partisipasi publik dalam implementasinya. Bagi komunikator tersebut, penyampaian pesan yang efektif kepada publik tidak cukup hanya melalui iklan dan kampanye di media massa. Memang komunikasi di media massa diakui memiliki pengaruh besar untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat. Namun untuk mencapai tahapan kesadaran dan implementasi masih perlu komunikasi persuasif melalui pendekatan langsung (interpersonal) kepada masyarakat. Misalnya membentuk kelompok-kelompok peduli cagar budaya di masyarakat maupun penanaman nilai-nilai pelestarian cagar budaya sejak dini. Usaha-usaha ini perlu dilakukan secara nyata. Pesan akan persoalan pelestarian cagar budaya menjadi tanggungjawab semua manusia, tidak hanya masyarakat tertentu. Hal ini bersifat mendesak, dan inilah sisi lain yang dapat dilakukan aparat pemerintah bidang kebudayaan untuk menghadapi orang-orang seperti BRG.

Dibutuhkan kelengkapan informasi untuk menyusun sebuah model pemberdayaan masyarakat disekitar temuan benda / situs cagar budaya. membantu memiliki persepsi yang lebih cermat. Keberadaan patung-patung pangulubalang yang masih dijumpai di wilayah perkampungan masyarakat batak (Simalungun), diakui sebagai penanda sejarah eksistensi kekuatan transenden yang dapat mengontrol atau memonitor kehidupan warga pada masa itu. Patung-patung pangulubalang tersebut harus kembali diletakkan di ujung-ujung pintu gerbang kampung masa kini. Patung pangulubalang bila dilihat sebagai artefak religi berpotensi dihancurkan karena sudah tidak sesuai dengan konsep-konsep religi baru (islam maupun kristen) masyarakat terkini. Masyarakat menyadari demi mengganti warisan artefak religi lama leluhur, bisa saja dilakukan kompromi untuk tidak harus memusnahkannya, dengan catatan perlakuan aspek pelestarian hanya mengacu kepada aspek nilai kebendaan (bukan nilai fungsional). Patung pangulubalang hanya dilihat sebagai sebuah patung arca warisan leluhur yang terbuat dari batu, bukan lagi patung yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Masyarakat tidak perlu harus mempercayai patung pangulubalang sebagai spion segala aktivitas masyarakat mereka. Namun bagi mereka yang menjadi percaya juga tidak masalah. Ada sebagian orang terkadang justru lebih takut terhadap patung dari pada manusia. Patung dianggap memiliki mata yang mampu menembus ruang, oleh sebab itu sangat ditakuti. Unsur ketakutan masyarakat justru akan menjadikan masyarakat baik yang di dalam maupun pendatang agar menjaga sikap yang sopan, terutama bila melewati jalan yang ada patung pangulubalangnya. Oleh sebab itu, kehadiran patung dipercaya mampu memantau aktifitas masyarakat yang memeliharanya.

Kekhawatiran tidak akan pernah bisa melestarikan benda cagar budaya seperti patung pangulubalang secara tuntas berpotensi menjadi konflik kepentingan baik di kalangan publik atau bahkan di dalam pemerintah. Instansi pemerintah di luar bidang cagar budaya bisa saja

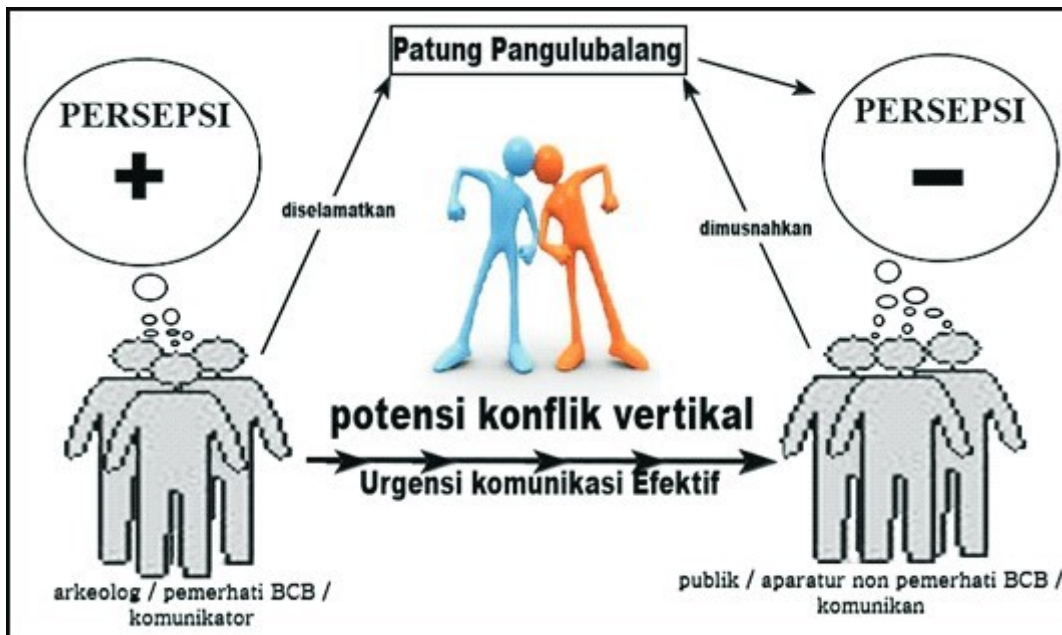
berpikiran sama sehingga patung Pangulubalang tidak direkomendasikan untuk dilakukan upaya penyelamatan dan pelestarian yang serius. Kalau dikatakan melanggar UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dapat menggunakan dasar argumentasi yang lain. Dengan adanya otonomi daerah pada masa terkini, pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di daerah. Perkembangan dan pengembangan yang berorientasi nilai komersial serta pembangunan yang tidak berwawasan budaya memberikan dampak negatif bagi pelestarian bangunan cagar budaya. Banyak artefak yang seharusnya masuk kategori BCB justru dibongkar dan diganti karena melihat dari aspek ekonomi dan kemanfaatannya (Koestoro 2006, 97--8). Pemerintah Kabupaten Simalungun bisa saja tidak serius dalam upaya penyelamatan dan perlindungan patung-patung pangulubalang yang ditemukan dengan dasar argumentasi bahwa tidak ada penganggaran dana dan secara fungsional dianggap mengganggu penghayatan masyarakat terhadap agama yang dianut sekarang. Maka wajar saja keberadaannya sangat dilematis karena dipandang sebagai “benda berhala” yang harus dilenyapkan sesuai perintah agama.

Sesuatu yang naif jika menjadi “alergi” terhadap nilai keberhargaan patung pangulubalang sebagai pusaka warisan keluarga. Umumnya bagi keluarga tradisional, warisan leluhur akan banyak dijumpai di rumah masing-masing sehingga mirip “museum kecil” dengan suasana keramat. Potensi kerusakan terhadap kelestarian BCB dengan sendirinya dinilai sangat rendah (Rahardjo 2011, 31). Maka logikanya BRG dapat dikatakan sebagai keluarga bukan tradisional (modern), karena patung pangulubalang. Namun tidak bisa juga langsung dikatakan kalau kealergiannya terhadap patung tersebut muncul karena menganut ajaran religi baru yang belum tentu modern dan mudah memahami terkait kemampuan membaca pesan religi sebagai “figur-figur mapan”. Kajian arkeologi dalam hal ini tidak melulu menyarankan untuk kembali terhadap wujud kebudayaan lama. Deskripsi arkeologis merupakan penolakan mentah terhadap sejarah ide-ide. Arkeologi tidak berusaha menentukan representasi “sejarah ide-ide”, tetapi ingin menentukan dan mendefinisikan wacana motif kealergian individual terhadap pelestarian BCB (diskursus) itu sendiri berdasarkan aturan-aturan tertentu (Foucault 2012, 250). Misalkan bagaimana membuat secara sistematis terhadap model komunikasi yang efektif kepada profil perseorangan “musuh pelestarian BCB” seperti BRG.

Istilah diskursus menurut Foucault, adalah sebuah tematisasi problem seputar kuasa, dimana dari hal tersebut, kuasa diproduksi dan memproduksi kuasa lainnya. Kuasa ini terdiri dari sebuah ide, perilaku, tindakan aksi, kepercayaan, kepemilikan, identitas-simbol, relasi dan praktek yang mengkonstruksi subjek membentuk objek masing-masing menuju titik-titik transformasi tertentu (Foucault 2012, 66-69). Sederhananya begini praktik pembuatan patung pangulubalang masa lalu (baca: diskursus) membentuk seperangkat pesan akan pengetahuan yang selanjutnya mempengaruhi praktik manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Diskursus tersebut membentuk objek (pengetahuan) sekaligus subjek (yaitu manusia-manusia

yang menyusun pengetahuan itu maupun yang dipengaruhi olehnya). Setiap objek yang berubah, tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif subjek yang sama (apalagi subjek yang berbeda). Sehingga dalam hal ini, diskursus senantiasa bersifat tidak berlanjut (diskontinyu). Pemahaman ini dibuktikan akan kenyataan bahwa selalu sering terjadi keterputusan historis, antara suatu obyek di konseptualisasikan dan dipahami. Selalu ada jarak dalam menafsirkan obyek oleh subjek seperti BRG. Maka sebagai solusi pembuatan model komunikasi yang efektif menjadi langkah awal membentuk seperangkat bakal pengetahuan untuk dipraktikkan sebagai sebuah subjektivitas dan relasi kekuasaan baru untuk orang-orang seperti BRG. Sederhananya arkeolog mencoba menangani perbedaan persepsi yang seserius mungkin dengan fokus mengetahui semua perbedaan yang bisa muncul. Seandainya terdapat paradok di dalam arkeologi, itu bukan karena dia memicu perbedaan-perbedaan tadi, akan tetapi justru karena mereduksi perbedaan-perbedaan tersebut, yang hanya memutarbalikkan nilai yang sudah ada. Nilai kekinian yang tidak bisa menerima sengaja memang harus dibiarkan. Persepsi terhadap masa lalu secara tidak langsung didasari pada pola pikir yang praktis dan pragmatis publik masa kini. Patung pangulubalang hanya tidak lebih dari tinggalan arkeologis sebagai sebuah tanda perjalanan manusia yang pernah ada, maka harus dilestarikan supaya secara fisik menjadi diskursus manusia yang akan datang.

Pelestariannya pun berpotensi mendapat perlawanan daripada opini publik yang tidak pro-pelestarian. Melestarikan benda cagar budaya dapat menimbulkan keengganan karena pesan sejarahnya dianggap tidak perlu dipertahankan seperti adanya pembantaian seorang anak kecil hanya demi kepercayaan akan rohnya telah masuk ke patung tersebut. Memang bukti sejarah seharusnya dapat diterima baik atau buruknya. Generasi muda yang berdomisili di kampung tentu ada yang akan berfikir mengapa patung pangulubalang harus tetap dipertahankan di kampung kami? Bukankah itu akan mengganggu pertumbuhan kepercayaan terhadap agama kami masing-masing, bila selalu melihatnya diletakkan di ujung jalan kampung? Dari perundangan tersebut, muncul potensi konflik antara mereka yang berusaha mempertahankan rumah candu sebagai BCB dengan publik yang kontra. Mereka dapat menggunakan acuan perundangan yang berbeda dalam mendukung kepentingan masing-masing. Ini merupakan sebuah dilema dalam usaha penyelamatan benda cagar budaya akibat persepsi yang tidak sama sejak dari awal. Nick Merriman dalam bukunya mengatakan bahwa hubungan antara arkeologi, warisan dan publik harus menjadi kajian khusus yang tidak boleh dikesampingkan. Berfokus pada dua bidang utama komunikasi dan stakeholders. Para arkeolog harus mengenal suasana komunikasi yang terjadi di lapangan penelitian. Interpretasi yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan sepihak harus dihindari, karena interpretasi dari pihak-pihak lain (stakeholders) memiliki bobot yang sama. Hal yang dibutuhkan adalah tawar-menawar kepentingan demi tercapainya kesepakatan untuk kepentingan bersama (Merrimen 2004,8-14). Potensi konflik vertikal biasa terjadi, karena ketidak-sadaran masing-masing pelaku komunikasi (lihat gambar 2).



Gambar 2. Model urgensi komunikasi yang efektif terhadap potensi konflik vertikal antara penyelamatan patung pangulubalang dengan masyarakat pemiliknya

Gambar di atas merupakan bentuk model yang bersifat model tinjauan komunikasi yang efektif dalam menghindari potensi konflik vertikal antara penyelamatan patung pangulubalang dengan masyarakat pemiliknya. Perlu melakukan survei lanjutan untuk memastikannya dengan menggunakan objek kasus yang sama yaitu benda-religi warisan leluhur. Yang melakukan pengkajian akan urgensi komunikasi yang efektif tentunya stakeholder praktisi kebudayaan/ arkeolog yang hendak terjun ke situs yang dikenal memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap kepentingan publik. Adapun publik dalam hal ini adalah semua orang yang secara sadar atau tidak menyadari memberikan respon penolakan terhadap usaha penyelamatan benda cagar budaya. Sebagai contoh misalkan di Kota Medan terdapat benda-benda warisan religi lama yang diduga sebagai benda cagar budaya. Apabila benda-benda tersebut tidak terawat, pada awalnya reaksi publik akan didominasi oleh pesan yang setuju memusnahkan ketimbang menyelamatkan. Alasan utama diprediksi karena tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Daripada dimusnahkan, maka sebaiknya aparaturnon pemerintah harus mampu meyakinkan secara tepat dan efektif kalau benda itu lebih baik diberikan kepada negara untuk dikaji lebih lanjut atau disimpan di dalam museum. Faktor studi kasus (etnografi) juga akan sangat berpengaruh. Maka dari itu, ekspansi global arkeologi publik terkait kasus-kasus bangunan harus dilengkapi dengan perlunya pemahaman kehati-hatian akan konteks lokal, terutama memperkuat kajian studi kasus terhadap tata bangunan dalam kesatuannya dengan ruang publik.

3. Penutup

3.1. Kesimpulan

Kegiatan peninjauan hanyalah tahapan yang masih sangat awal. Urgensi komunikasi efektif dalam menyelamatkan patung pangulubalang agar menghindari konflik vertikal di Kabupaten Simalungun dapat ditempuh apabila ada perhatian tersendiri untuk mendalaminya khususnya bagi aparat pemerintah. Eksistensi patung pangulubalang kini harus disikapi dengan meninggalkan sifat keberhalaan, patung sebagai warisan leluhur nenek moyang Batak harus lebih dipandang sebagai karya seni yang sarat dengan ajaran-ajaran moral. Patung Pangulubalang sebagai karya seni masa lalu atau artefak merupakan sebuah teks yang mampu membimbing manusia kini untuk menelusuri kearifan manusia masa lalu guna mempelajari budaya kini dan sebagai proyeksi untuk masa depan. Di balik itu patung juga berfungsi sebagai teks yang bicara dan menjelaskan pola pikir masyarakat pendukungnya. Pemahaman patung primitif dengan kaitan keberhalaan sudah harus ditinggalkan. Patung pangulubalang ibarat teks-teks yang rumit yang perlu dibaca dan diterjemahkan, dan filsafat adalah satu-satunya formula untuk mengungkap kecerdasan dan pandangan hidup orang Batak itu. Diperlukan kearifan dalam memahami patung sebagai karya cipta kebudayaan sehingga kita terhindar dari pemikiran sempit yang menganggap patung sebagai berhala, yang mungkin sensitif bagi penganut kepercayaan / agama yang beranekaragam.

3.2. Saran / Rekomendasi

Langkah yang perlu dilakukan adalah fokus pada penanganan lokasi temuan dan melatih kemampuan komunikasi yang efektif bagi aparat pemerintah yang ditugaskan melakukan peninjauan ke lapangan. Manfaat dari kegiatan ini lebih kepada memenuhi permintaan publik terkait temuan yang diduga benda cagar budaya. Hal ini penting mengingat tujuan akhir kegiatan ini adalah sesuatu yang kongkrit seperti dibuatkan sebuah kegiatan penelitian sebagaimana tupoksi Balai Arkeologi Medan melalui koordinasi antarstakeholder. Areal temuan patung merupakan lokasi tanah sudah diratakan kira-kira sedalam satu meter lebih menggunakan alat berat untuk dijadikan makam ziarah sekaligus sebagai tempat taman rekreasi, sehingga disayangkan konteks temuan selain patung pangulubalang akan semakin sulit direkonstruksi. Namun dianggap perlu untuk melakukan penggalian penyelamatan, setidaknya menurunkan tim yang bekerja dalam waktu singkat untuk mencari himpunan data yang berkonteks sama dengan patung tersebut. Kegiatan juga sebaiknya untuk sekaligus mengecek informasi bahwa di kampung tersebut sebenarnya terdapat kurang lebih delapan patung pangulubalang sekitar tahun 1937, artinya masih baru dua yang ditemukan seharusnya masih bisa mencari sisanya untuk diselamatkan terlebih dahulu, sambil menunggu penanganan selanjutnya.

*) Catatan: Untuk menjaga nama baik seseorang maka penulisan nama hanya menggunakan inisial saja.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. 2007. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Damaratuti, R. 2013, Mindfullnes Dalam Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Buku Litera.
- Foucault, Michael, 2012, Arkeologi Pengetahuan, Yogyakarta : IRCiSoD
- Haryono, Timbul, 1984. Artefak : Kualitas dan Validitasnya sebagai Data Arkeologi Buletin, Artefak No. 1/1/ 1984.
- Koestoro, Lucas P, dkk. 2006. Medan, Kota di Pesisir Timur Sumatera Utara dan Peninggalan Tuanya. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Kuswarno, E. 2008. Metode Penelitian Komunikasi : Etnografi Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran
- Marbun dan Hutapea, 1987. Kamus Budaya Batak Toba. Jakarta: Balai Pustaka
- Marsden, W, 2013. Sejarah Sumatra. Jakarta : Komunitas Bambu
- Merriman, Nick (ed.). 2004. Public Archaeology. London & New York: Routledge. .
- Moleong, Ledy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, 2001, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung : PT. Remadja Rosdakarya.
- Nainggolan, Togar. 2012. Batak Toba : Sejarah dan Transformasi Religi. Medan : Bina Media Perintis
- Okamura dan Matsuda. 2011. New Perspectives in Global Public Archaeology. Osaka:Springer
- Partanto dan Yacub. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Penerbit Arkola
- Rahardjo, Supratikno. 2011. Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia, Bandung : Lubuk Agung, .
- Rochajat Harun. 2011. Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kristis. Jakarta : Rajawali Pers
- Sonjaya, Jajang A. 2008. Melacak Batu Menguak Mitos: Petualangan Antarbudaya di Nias. Yogyakarta: Kanisius
- Sirait, B Charles. 2007. The power of Public Speaking: Kiat Sukses Berbicara di Depan Publik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sulistiyanto, Bambang. 2008. Resolusi Konflik Dalam Managemen Warisan Budaya Situs Sangiran. Disertasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta : Salemba Humanika
- Wiradnyana, Ketut. 2011. Prasejarah Sumatera Bagian Utara: Kontribusinyapada Kebudayaan Kini. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zamroni, Mohammad, 2009. Filsafat Komunikasi: Penghantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis. Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan-Peraturan

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Laman

- Hardi, 2013. " 2 Patung Ditemukan Di Areal Makam Tuan Rondahaim". <http://simantap.com/?p=8437.html>, edisi Jumat 26 Juli 2013, diakses tanggal 27 Juli 2013
- Riddle, J.2011 "5 Things To Practice for Effective Communication Skills" <http://workawesome.com/communication/effective-communication-skills/>, diakses tanggal 20 Agustus 2013